



CARNEGIE
ENDOWMENT FOR
INTERNATIONAL PEACE

APRIL 2023

CHINA *local* / *global*

Bagaimana Indonesia Mendayagunakan Investasi Industri Tiongkok untuk Mengubah Nikel menjadi Emas Baru

Angela Tritto

Bagaimana Indonesia Mendayagunakan Investasi Industri Tiongkok untuk Mengubah Nikel menjadi Emas Baru

Angela Tritto

Inti sari web: Prakarsa Sabuk dan Jalan Tiongkok membantu pembangunan kawasan industri di Indonesia—tetapi kontestasi di tingkat lokal dan nasional memaksa pemain Tiongkok untuk beradaptasi dengan kondisi Indonesia yang berubah cepat.

© 2023 Carnegie Endowment for International Peace. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

Carnegie tidak mengambil posisi institusional pada isu kebijakan publik; pandangan yang terwakili dalam dokumen ini merupakan milik penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dari Carnegie, karyawan, atau dewan pengurusnya.

Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh diproduksi atau disiarkan ulang dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Carnegie Endowment for International Peace. Silakan ajukan pertanyaan ke:

Carnegie Endowment for International Peace
Publications Department
1779 Massachusetts Avenue NW
Washington, DC 20036
P: +1 202 483 7600
F: +1 202 4831840
CarnegieEndowment.org

Publikasi ini dapat diunduh secara gratis di situs web CarnegieEndowment.org.

Foto Sampul: BANNU MAZANDRA/AFP melalui Getty Images

DAFTAR ISI

China Local/Global	vii
Ringkasan	1
Pendahuluan	2
Indonesia dan Transformasi Sektor Mineralnya	4
Indonesia Morowali Industrial Park: Bagaimana Indonesia Memikat Investasi Tiongkok untuk Menempatkan Dirinya di Rantai Nilai Global Kendaraan Listrik	7
Adaptasi: Menjadikan Kawasan Industri Investasi Tiongkok Menjadi Milik Indonesia	9
Efek Makro: IMIP, Nasionalisme Sumber Daya, dan Transisi Energi Terbarukan Indonesia	13
Pelajaran dan Adaptasi Tiongkok	19
Tentang Penulis	21
Catatan	22

China Local/Global

Tiongkok telah menjelma menjadi kekuatan global, tetapi tidak banyak yang mempertanyakan *bagaimana* hal ini terjadi dan apa artinya. Banyak yang berpendapat bahwa Tiongkok mengeksport metode pembangunannya dan memaksakannya pada negara lain. Tapi pemain Tiongkok juga memperluas pengaruh mereka dengan bekerja sama dengan aktor dan institusi lokal sambil menyesuaikan dan mengasimilasi bentuk-bentuk, norma-norma, dan praktik-praktik lokal serta tradisional.

Dengan dana hibah multi-tahun yang melimpah dari Ford Foundation, Carnegie telah meluncurkan serangkaian penelitian inovatif tentang strategi keterlibatan Tiongkok di tujuh wilayah dunia—Afrika, Asia Tengah, Amerika Latin, Timur Tengah dan Afrika Utara, Pasifik, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Melalui perpaduan riset dan pertemuan strategis, proyek ini menyelami dinamika yang kompleks, termasuk mengkaji bagaimana perusahaan Tiongkok beradaptasi dengan undang-undang ketenagakerjaan setempat di Amerika Latin, seperti apa bank-bank dan pendanaan Tiongkok menjajaki produk-produk keuangan Islam tradisional di Asia Tenggara dan Timur Tengah, serta bagaimana aktor Tiongkok membantu pekerja setempat meningkatkan keterampilan mereka di Asia Tengah. Strategi adaptif Tiongkok yang mengakomodasi dan bekerja dalam realitas lokal kebanyakan diabaikan oleh para pembuat kebijakan Barat pada umumnya.

Pada akhirnya, proyek ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan perdebatan tentang peran Tiongkok di dunia secara signifikan serta menghasilkan ide-ide kebijakan inovatif. Hal ini dapat memungkinkan pemain lokal dalam menyalurkan energi Tiongkok dengan lebih baik untuk mendukung masyarakat dan ekonomi mereka; memberikan pembelajaran bagi keterlibatan Barat di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang; membantu komunitas kebijakan Tiongkok sendiri belajar dari keragaman pengalaman Tiongkok; dan berpotensi mengurangi gesekan.

Evan A Feigenbaum

Wakil Presiden untuk Pengkajian, Carnegie Endowment for International Peace

Ringkasan

Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berlokasi di Sulawesi Tengah merupakan salah satu investasi Tiongkok terbesar di Indonesia, dan dinyatakan oleh para pendirinya sebagai bentuk kerja sama Sino-Indonesia yang sempurna. Meski melambangkan sinergi yang kuat antara investasi Tiongkok dan rencana pembangunan Presiden Indonesia Joko Widodo, kawasan industri tersebut juga tengah menghadapi beberapa kontestasi, di tingkat lokal, nasional, dan bahkan—walaupun secara tidak langsung—internasional. Pelaku industri Tiongkok harus beradaptasi dengan gejolak arus perubahan di Indonesia yang dapat berubah dengan cepat. Cara mereka melakukannya menunjukkan sejauh mana mereka telah belajar menavigasi realitas dalam negeri Indonesia saat ini.

Kawasan industri ini memiliki ciri khas Zona Ekonomi Khusus yang berorientasi pada pertumbuhan ekspor dari Tiongkok. Dibangun di daerah yang masih asli namun kaya sumber daya di Sulawesi Tengah, proyek ini mendorong pembangunan dalam bentuk infrastruktur baru seperti pelabuhan, jalan raya, dan bandara, yang menghubungkan bagian negara yang tadinya tidak aktif ini dengan wilayah lain di Indonesia dan selanjutnya ke seluruh dunia. Proyek ini juga mendorong teknologi baru, penambahan modal, dan pembukaan lapangan kerja yang mengundang pekerja migran dari seluruh Sulawesi untuk pindah ke wilayah pulau ini. Dua faktor utama mendorong perkembangannya: Prakarsa Sabuk dan Jalan Tiongkok, atau dikenal juga dengan BRI Tiongkok, yang membekali proyek ini dengan landasan pacu agar diangkat menjadi prioritas strategis nasional, beserta apapun yang dibutuhkan untuk memfasilitasinya; dan penerapan larangan ekspor mineral mentah oleh pemerintah Indonesia, yang pada dasarnya memaksa pelaku industri Tiongkok untuk berinvestasi di smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian bahan galian tambang) di Indonesia demi mengamankan sumber nikel mereka.

Namun transformasi industri ini tidak terjadi begitu saja tanpa imbas – pada lingkungan, dan pada mata pencarian masyarakat adat di tempat ini, atau tanpa kontestasi mengenai kondisi tenaga kerja dan kurangnya kepatuhan terhadap hukum dan kebiasaan setempat. Kontestasi yang terkadang keras ini memicu perusahaan Tiongkok untuk berstrategi agar dapat beradaptasi dengan konteks setempat dan menjalankan serangkaian upaya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang ditujukan untuk mengurangi dampak para pelaku industri Tiongkok sekaligus untuk memperbaiki citra mereka.

Di tingkat internasional, larangan ekspor juga mengundang kritik atas pelanggaran aturan perdagangan bebas oleh Indonesia, dengan gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa (UE) terhadap Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan sejumlah kritik yang dilontarkan oleh para pelaku industri pembuatan baja yang dominan di Asia seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Namun kawasan industri tersebut terus berkembang demi mengakomodir aktivitas baru yang berkaitan dengan produksi baterai kendaraan listrik (EV), yang memicu terjadinya pergeseran dan

ketidakpastian baru dalam pasokan nikel global. Oleh karena itu, para aktivis serta pengamat lokal dan internasional menyampaikan sejumlah kekhawatiran baru seputar keberlanjutan ekonomi, lingkungan, atau sosial dari transisi energi terbarukan tersebut.

Pendahuluan

Ketika Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan Jalur Sutra Maritim Abad 21 (MSR) dalam pidatonya di parlemen di Jakarta, hal ini menunjukkan kepentingan strategis dan visi ambisius negara tersebut. Terdapat banyak alasan yang menjadikan perhatian Tiongkok terpusat pada Indonesia. Lokasinya yang terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik membuat Indonesia berada di jalur lintas Selat Malaka untuk kapal komersial dan lainnya, serta berbatasan juga dengan bagian selatan Laut Tiongkok Selatan. Pasar domestik Indonesia yang besar, muda, dan berkembang serta sumber daya alamnya yang luas dan sebagian besar belum dimanfaatkan menjadikannya pasar yang memikat bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi.

Dan Indonesia menyambut baik investasi Tiongkok karena defisit infrastrukturnya yang terbesar di Asia Tenggara sangat menghambat potensi pertumbuhannya.¹ Oleh karena itu, konektivitas yang merupakan prioritas agenda pembangunan negara menjadikan Indonesia kandidat yang sempurna untuk investasi, kontrak konstruksi, dan terobosan lainnya dari Tiongkok. Yang terpenting, walau ada yang mempertanyakan peran kepemimpinan regionalnya dalam beberapa tahun terakhir,² para pengamat dan ilmuwan sama-sama memandang Indonesia sebagai “pemimpin alami”, “pertama di antara yang sederajat”, dan “kunci keberhasilan” bagi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), mengingat peran besar Indonesia sebagai salah satu dari enam anggota negara pendiri. Indonesia juga merupakan anggota forum ekonomi G20 dan secara luas dipandang berpotensi untuk memiliki pengaruh yang besar secara geopolitik di luar Asia Tenggara.³

Di masa lalu, ketika hubungan Tiongkok dengan negara-negara ASEAN tidak terlalu bersahabat, permasalahan sering berkisar pada hubungan Tiongkok dengan Indonesia.⁴ ASEAN yang baru-baru ini mengadopsi Pandangan atas Indo Pasifik (*Outlook on Indo-Pasifik*) yang dirancang oleh Indonesia menandakan bahwa Presiden Joko Widodo berharap untuk menghidupkan kembali dan memanfaatkan peran kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN untuk memperkuat keamanan regional.⁵ Oleh karena itu, dukungan Indonesia di ASEAN sangat penting bagi posisi dan hubungan Tiongkok di kawasan ini; mungkin inilah alasan Presiden Xi memilih negara ini sebagai destinasi kunjungan pertamanya di Asia Tenggara dan mengumumkan MSR-nya. Sementara itu, setelah terpilih pada tahun 2014, Jepang dan Tiongkok menjadi destinasi kunjungan resmi pertama Presiden Joko Widodo guna menjalankan “diplomasi ekonomi” dan mendapatkan dukungan keuangan dan

teknis untuk rencana pembangunan infrastruktur dan industri domestiknya.⁶ Salah satu tujuan utama yang diupayakan oleh pendahulunya, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, adalah menghilangkan ketergantungan Indonesia pada ekspor mineral mentah dan mendiversifikasi ekonomi negara dengan menarik investasi untuk memajukan pembangunan industri, mengubah ekspor mineral mentah menjadi ekspor yang lebih bernilai tambah.

Akibatnya, baik Yudhoyono maupun Widodo melihat BRI Tiongkok sebagai landasan untuk merundingkan dan memfasilitasi investasi dari perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia guna mencapai tujuan domestik tersebut. Dan dalam banyak hal, niat Indonesia ini berhasil terwujud dengan didirikannya berbagai kawasan industri oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri Indonesia.

Namun terlepas dari kuatnya fasilitasi negara dari pemerintah pusat di Jakarta, lingkungan bisnis Indonesia tetap terasa sulit bagi investor asing, dan bagi investor Tiongkok khususnya. Kurang memadainya infrastruktur, peraturan dan birokrasi yang rumit dan selalu berubah-ubah—bahkan sewenang-wenang—seringkali menyebabkan perusahaan asing enggan berinvestasi di Indonesia. Hambatan dan kesukaran untuk investasi di sektor mineral, yang pernah menarik konglomerat besar asing, kini menjadi semakin menantang berkat meningkatnya kontrol pemerintah melalui penerapan peraturan seperti larangan ekspor dan daftar investasi negatif. Namun bagi perusahaan Tiongkok khususnya, kendala yang lebih besar lagi adalah masih meluasnya sentimen anti Tiongkok di dalam negeri.

Oleh karena itu, investasi BRI Tiongkok di Indonesia dihadapkan pada percampuran politik dalam negeri yang kompleks. Widodo harus berhati-hati menyeimbangkan dukungan oportunistis untuk MSR dengan ancaman yang ditimbulkan oleh dukungan semacam itu kepadanya secara politis, seperti ketika dia menghadapi oposisi selama kampanye pemilihannya kembali tahun 2019 dan, secara lebih luas, ketika dia berupaya mempertahankan dukungan politis di samping sentimen skeptis terhadap Tiongkok. Fokus Widodo pada persyaratan konten lokal dan transfer teknologi dari perusahaan Tiongkok ke Indonesia sedikit banyak terbantu oleh media lokal yang secara konsisten menyoroti investasi besar Tiongkok, yang terkadang dapat mengakibatkan merebaknya informasi yang keliru. Salah satu contoh kasusnya adalah klaim yang sering dibesar-besarkan, palsu, atau menyesatkan tentang pekerja ilegal dan kondisi kerja yang dilayangkan kepada IMIP yang merupakan investasi terbesar Tiongkok di sektor mineral dalam negeri. Namun di tengah serentetan informasi yang keliru tentang kawasan industri tersebut, terdapat pula kekhawatiran yang nyata seputar penghormatan terhadap adat dan tradisi setempat, pengabaian peraturan lingkungan Indonesia, dan potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas kawasan industri tersebut.

Kontestasi di media dan pengawasan publik ini menghasilkan serangkaian tanggapan baik oleh perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di kawasan industri tersebut maupun oleh pemerintah daerah Indonesia. Tekanan dari dalam negeri mendorong kawasan industri ini untuk berinvestasi pada pelatihan yang lebih baik, peningkatan strategi komunikasi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini juga menjembatani dialog dengan otoritas lokal untuk memperbaiki peraturan atas pemberdayaan tenaga kerja asing.

Sementara itu, administrasi pemerintah Indonesia baik lokal maupun nasional berupaya untuk lebih dapat mengendalikan penyebaran misinformasi dan disinformasi, sekaligus menyederhanakan proses investasi bagi perusahaan asing di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan Tiongkok. Kabupaten Morowali juga meningkatkan alokasi belanja publik untuk infrastruktur dan pendidikan. Namun, seiring berkembangnya kawasan industri, permasalahan baru muncul, mulai dari sengketa terkait pelanggaran perjanjian perdagangan bebas hingga tujuan keberlanjutan jangka panjang dan komitmen perubahan iklim internasional yang tidak akan terpenuhi karena ketergantungan Indonesia yang tinggi pada batu bara untuk pengembangan industri tersebut.

Bagian selanjutnya dari tulisan ini membahas latar belakang tentang bagaimana Indonesia secara aktif mengejar penanaman modal asing (PMA) Tiongkok demi merestrukturisasi sektor mineralnya, menyajikan data investor asing utama di industri tersebut dan memeriksa sebab belum diprosesnya larangan ekspor Indonesia pada tahun 2014 untuk mineral yang belum diolah. Larangan ekspor adalah salah satu faktor kunci yang, bersama dengan BRI Tiongkok, mendorong pengembangan IMIP, yang akan dibahas lebih mendalam di bagian selanjutnya. Kemudian akan didiskusikan pula bagaimana kawasan industri tersebut dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan konteks lokal Indonesia. Bagian penutup menyuguhkan implikasi perluasan kawasan industri yang sedang berlangsung dengan mempertimbangkan dinamika dari industri nikel secara lebih luas, serta semakin pentingnya industri manufaktur baterai EV dan transisi energi terbarukan.

Indonesia dan Transformasi Sektor Mineralnya

Sektor sumber daya mineral Indonesia telah memainkan peran penting dalam perekonomian nasional negara ini, dan besarnya sumber daya mineral bahan bakar dan non-bahan bakar telah menarik minat perusahaan asing sejak zaman kolonial Belanda. Sebelum jatuhnya mantan presiden Suharto dan dimulainya era Reformasi pada tahun 1998, Indonesia memiliki arsitektur hukum yang mendukung investasi asing, dan pada akhir abad ke-20, negara ini menjadi salah satu penghasil timah, tembaga, dan nikel utama dunia.⁷

Setelah tahun 1998, terdapat upaya desentralisasi yang kuat yang bertujuan mengekang kecenderungan separatis di daerah kaya sumber daya yang mengakibatkan reformasi besar dalam industri ini. Arsitektur desentralisasi baru ini memberikan otonomi penuh pada tingkat kabupaten—sebuah divisi administratif Indonesia yang berada langsung di bawah provinsi—untuk menerapkan kebijakan lokal, tetapi tidak pada tingkat provinsi sehingga mengurangi kewenangan pemerintah pusat dalam hal tersebut.

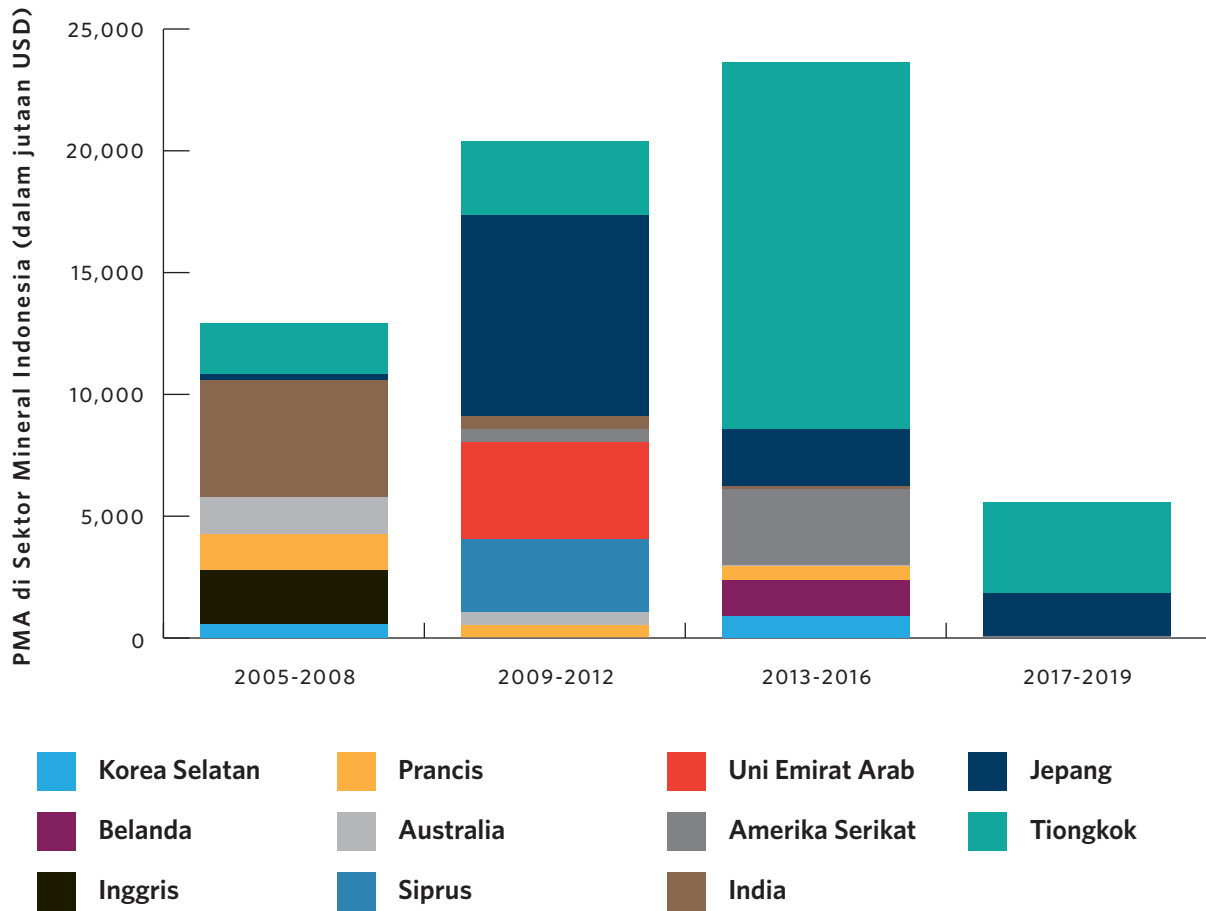
Akan tetapi, reformasi ini tidak diberlakukan sampai hampir satu dekade kemudian karena sulitnya menangani banyak kepentingan yang bersaing di sektor ini, termasuk kepentingan berbagai tingkat entitas pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Undang-undang pertambangan Indonesia yang diperkenalkan pada bulan April 2009 menambah kepelikan dan menandai dimulainya fase baru dalam hal intervensi negara dan nasionalisme sumber daya di sektor ini. Undang-undang tersebut memperkenalkan sistem perizinan baru dan menginstruksikan dunia usaha untuk menggunakan jasa pertambangan domestik daripada asing, sehingga semakin membuka peluang bagi elit ekonomi Indonesia untuk memiliki konsesi pertambangan.

Pada masa ledakan komoditas mineral kala itu, pemerintah Presiden Yudhoyono dan para pemangku kepentingan utama industri dalam negeri mulai percaya bahwa sumber daya Indonesia terkuras dengan sangat cepat tetapi tidak membawa banyak manfaat bagi negara. Akibatnya, mereka bertujuan untuk mengalihkan produksi mineral Indonesia dari yang hanya didasarkan pada kegiatan ekstraksi dengan menyalurkan investasi ke manufaktur logam.⁸ Tujuan ini disebutkan dalam undang-undang pertambangan yang baru itu sendiri, sehingga peraturan pemerintah baru yang dikeluarkan setahun kemudian—Peraturan Pemerintah Nomor 23 (2010)—mewajibkan perusahaan pertambangan untuk mengolah dan memurnikan mineral yang mereka tambang sebagai nilai tambah bagi produk *sebelum* mengekspornya.

Perusahaan pemegang kontrak kerja atau izin pertambangan diberi tenggang waktu lima tahun untuk mempersiapkan investasi di fasilitas pengolahan.⁹ Pergeseran besar dalam kebijakan ini, bersama dengan serangkaian kebijakan yang bertentangan setelahnya,¹⁰ menimbulkan ketidakpastian pasar yang tinggi dan menyebabkan perubahan besar dalam pergerakan investor asing di pasar dalam negeri. Gambar 1 di bawah ini menunjukkan perkembangan sumber PMA di sektor mineral Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.

Pada awal masa jabatan presiden Yudhoyono yang dimulai pada tahun 2004, investasi di sektor mineral Indonesia sebagian besar berasal dari Australia, India, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya. Investasi dari India sebagian besar dalam pembuatan produk besi dan baja nirkarat (*stainless steel*). Investasi dari Australia sebaliknya lebih terdiversifikasi, terdiri dari ekstraksi emas dan perak,

Gambar 1. PMA di Sektor Mineral Indonesia



SUMBER: Elaborasi penulis atas informasi dari fDi Markets (database), Financial Times fDI Intelligence, diakses 11 April 2023, <https://tinyurl.com/2npxyumu>.

dan, pada tingkat yang lebih rendah, manufaktur baja. Investasi dari Eropa seluruhnya dalam industri ekstraksi, terkonsentrasi pada nikel, tembaga, dan emas. Kemudian, antara tahun 2009 dan 2012, investasi yang berasal dari Jepang dan Uni Emirat Arab naik menjadi yang terbesar di sektor mineral Indonesia, terutama produksi baja dan alumina.

Pada kurun waktu yang sama, perusahaan Tiongkok juga berinvestasi dalam industri ekstraksi dan pemrosesan logam di Indonesia, tetapi baru setelah tahun 2013 perusahaan Tiongkok menjadi sumber investasi paling menonjol di sektor ini. Usaha-usaha di bawah Tsingshan Group, produsen baja nirkarat terkemuka dunia menjadi salah satu yang terbesar di antara investasi dari Tiongkok. Salah satu investasi pertama grup ini adalah pabrik baja nirkarat di Pulau Obi di Maluku Utara. Namun, investasi \$500 juta untuk membangun pabrik smelter dalam kemitraan dengan sebuah perusahaan milik negara Indonesia gagal hanya dalam satu tahun karena penurunan harga dan

produksi nikel pig iron (NPI).¹¹ Demikian pula, investasi lain—termasuk IMIP yang bekerja sama dengan Bintang Delapan, sebuah perusahaan pertambangan besar Indonesia—diinisiasi antara tahun 2007 dan 2009, tetapi tidak terwujud hingga beberapa waktu kemudian.

Hal yang mendorong investasi Tiongkok ini hingga akhirnya terwujud bertahun-tahun kemudian adalah penerapan larangan ekspor Indonesia untuk mineral yang belum diolah pada tahun 2014, hanya satu tahun setelah peluncuran MSR oleh Xi.¹² Ketika Presiden Widodo mulai menjabat pada tahun 2014, ia mendukung larangan tersebut, melihatnya sebagai penunjang agenda ekonomi nasionalnya demi menarik investasi hilir dan meningkatkan lapangan kerja serta produksi industri bernilai tambah di Indonesia. Latar belakang pelarangan ini adalah peristiwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang tinggi akibat ledakan komoditas yang didorong oleh Tiongkok antara tahun 2005 dan 2011—pertumbuhan yang banyak membantu statistik ekspor Indonesia tetapi tidak berdampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan, sebuah fokus utama agenda pembangunan Indonesia. Akibatnya, strategi pelarangan ekspor yang ditujukan untuk memastikan produksi bernilai tambah di dalam negeri menjadi sebuah tolok ukur pada tahun-tahun itu.¹³

Indonesia Morowali Industrial Park: Bagaimana Indonesia Memikat Investasi Tiongkok untuk Menempatkan Dirinya di Rantai Nilai Global Kendaraan Listrik

IMIP memang difasilitasi oleh BRI Tiongkok. Namun secara lebih luas, hal itu terjadi sebagai hasil dari koordinasi dan lobi oleh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, proyek ini banyak dibentuk dan dikondisikan oleh berbagai kontestasi politik dan sosial di Indonesia yang timbul dari pembangunan yang pesat dan ekstensif.

Pada tahun 2014, Tsingshan Group, yang saat ini memiliki produksi feronikel dan produk baja nirkarat terbesar di dunia, menjadi investor Tiongkok yang paling menonjol di sektor pengolahan mineral di Indonesia. Investasi grup ini terkonsentrasi di IMIP yang berlokasi di Bahodopi, sebuah kecamatan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah—daerah yang kaya akan sumber daya nikel. Pada bulan Oktober 2009, anak perusahaan Tsingshan Group, Shanghai Decent, mendirikan perusahaan patungan (*joint-venture*), PT Sulawesi Mining Investment, untuk berinvestasi pada pabrik smelter dan diberikan hak ekstraksi atas 47.040 hektar lahan penambangan bijih nikel laterit di Morowali.¹⁴ Namun tidak ada rencana konkret yang terwujud hingga Oktober 2013 ketika Xi dan Yudhoyono menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman untuk mengembangkan kawasan industri tersebut pada acara pidato Xi untuk meluncurkan MSR Tiongkok. Pada saat yang sama, perusahaan patungan baru didirikan antara Shanghai Decent Investment Group dan Bintang Delapan Group untuk membangun IMIP. Hal ini mengundang sekelompok perusahaan untuk

Tabel 1. Perusahaan yang Berinvestasi di IMIP

Nama perusahaan	Tahun	Aktivitas
Shanghai Decent Investment Group	2014	Perusahaan investasi
PT Landseadoor International Shipping	2014	Pengiriman, transportasi kargo curah
PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry	2014	Produksi baja dan baja nirkarat
PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel	2014	Produksi baja dan baja nirkarat
PT Indonesia RuiPu Nickel and Chrome Alloy	2016	Impor nikel dan mineral lainnya
PT Ekasa Yad Resources	2016	Anak Perusahaan Tsingshan; produksi baja nirkarat
PT Tsingshan Steel Indonesia	2016	Produksi baja nirkarat
PT Hengjia Nickel Industry Indonesia	2018	Produksi feronikel
PT Renjia Nickel Industry Indonesia	2018	Produksi feronikel
PT Huayue Nichrome Indonesia	2019	Produksi nikel kromium hidroksida
PT Qing Mei Bang New Energy Materials Indonesia	2019	Produksi bijih nikel laterit
Indonesia Morowali Power Co., Ltd.	2019	Produksi energi

SUMBER: Pius Ginting dan Ellen Moore, "Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)," People's Map of Global China, 22 November 2021, <https://thepeoplesmap.net/project/indonesia-morowali-industrial-park-ilip/>; pengamatan pribadi penulis terhadap fasilitas dan material perusahaan.

berinvestasi di kawasan industri tersebut dan mendirikan perusahaan-perusahaan baru seiring perkembangan proyek (lihat tabel 1).

Berbagai perusahaan lain dari Australia, Tiongkok, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan negara lain juga terlibat dalam kawasan industri tersebut dan menerima banyak dukungan finansial dari BRI Tiongkok. Pembiayaan awal datang dari China-ASEAN Investment Cooperation Fund, dana kekayaan kuasi-negara yang berpautan dengan Export-Import Bank of China. Proyek ini juga menerima pinjaman \$1,22 miliar dari China Development Bank, bank kebijakan negara Tiongkok lainnya, yang saat ini merupakan pemberi pinjaman terbesar untuk kawasan industri tersebut. Tsingshan Holding Group merupakan investor terbesar di IMIP dan pemegang saham signifikan dalam semua aktivitasnya, mulai dari infrastruktur dan tambang hingga berbagai proses yang terjadi dalam pembangunannya. Kawasan industri ini membentang di tanah yang berukuran lebih dari 2.000 hektar (20 kilometer persegi), lahan yang sebelum tandus. Kawasan industri tersebut mendatangkan investasi ke dalam semua infrastruktur pendukung yang diperlukan, termasuk energi, sehingga sekarang memiliki pembangkit listrik berdaya 1,9 gigawatt (dengan rencana perluasan menjadi 2,9 gigawatt), pelabuhan, dan infrastruktur transportasi seperti jalan raya.

Pembangkit listrik tenaga batu bara di IMIP didanai oleh China Development Bank, Export-Import Bank of China, Bank of China, dan Industrial and Commercial Bank of China, yang merupakan

bank-bank terbesar milik negara Republik Tiongkok.¹⁵ IMIP juga memiliki kompleks perumahan (khusus untuk pekerja asal Tionghoa), hotel untuk pengunjung eksekutif, bandara dengan landasan pacu sepanjang 1.800 meter, dan jaringan telekomunikasi terdedikasi yang dilengkapi kabel bawah laut yang langsung terhubung dengan satelit Tiongkok sendiri. Fasilitas produksi di kawasan industri tersebut meliputi pabrik kapur, kokas, dan asam; sebelas pabrik smelter untuk produksi baja nirkarat, NPI, dan ferro-krom; dan dua fasilitas pelindian asam bertekanan tinggi (HPAL) untuk mengekstraksi nikel dan kobalt dari bijih laterit. Kedua fasilitas ini dimiliki dan dioperasikan oleh PT QMB New Energy Materials (perusahaan patungan dari beberapa perusahaan daur ulang dari Tiongkok), IMIP, perusahaan Jepang Hanwa, dan PT Huayue Nickel and Cobalt. Investasi bersama ini mencapai lebih dari \$2 miliar dari total \$8 miliar yang diinvestasikan di kawasan industri tersebut sejauh ini.

Dan investasi ini merupakan cara lain untuk memenuhi permintaan Indonesia dalam upaya mendiversifikasi pemanfaatan sumber daya nikelnya: melalui proses HPAL, Indonesia sekarang memproduksi nikel bahan baku baterai dan bahan baku lain yang dibutuhkan oleh pasar kendaraan listrik (EV) yang tengah berkembang. Saat ini, fasilitas produksi di Indonesia—tersebar di Morowali, Pulau Obi (Maluku Utara), dan Teluk Weda (Halmahera)—memasok sembilan pabrik yang menyumbang lebih dari 40 persen produksi kendaraan listrik dunia, sehingga menempatkan Indonesia sebagai poros dalam rantai pasokan global baru yang mendorong transisi energi terbarukan.¹⁶

Adaptasi: Menjadikan Kawasan Industri Investasi Tiongkok Menjadi Milik Indonesia

Pada tahun 2020, IMIP mempekerjakan sekitar 43.000 pekerja dan secara tidak langsung menopang setidaknya 30.000 usaha kecil dan bisnis lokal lainnya (sebagian besar merupakan pemasok dan pelaku industri bidang konsumsi) untuk melayani kawasan industri tersebut dan jumlah karyawannya yang terus meningkat. Hanya sekitar 5.000 dari orang-orang ini yang berasal dari Tiongkok, sehingga porsi angkatan kerja Indonesia (baik langsung maupun tidak langsung) sangat besar.¹⁷

Karyawan Tionghoa IMIP umumnya mengisi peran pengawasan, teknis, atau manajerial, sementara karyawan Indonesia menjadi tenaga kerja utama. Menurut seorang mantan eksekutif senior, kawasan industri tersebut sering menyelenggarakan kegiatan untuk memfasilitasi pertukaran dan persahabatan antar budaya. Ia menyatakan bahwa sudah banyak pernikahan antara pekerja Tionghoa dan Indonesia, yang mengindikasikan hubungan antar budaya yang baik dan positif di tempat kerja.¹⁸ Namun pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan berbagai laporan yang menguraikan konflik budaya antara pekerja Tionghoa dan Indonesia dan isu-isu seputar manajemen tenaga kerja lokal yang muncul di kawasan industri tersebut.

Gesekan budaya sebagian besar berkaitan dengan segregasi pekerja Tionghoa di kawasan industri, dengan perlakuan istimewa yang diberikan kepada mereka, dan seputar penghormatan terhadap norma agama dan budaya setempat. Faktanya, laporan dan wawancara daring selama penelitian lapangan oleh penulis di Indonesia menyoroti bahwa pekerja Tionghoa tinggal di dalam kawasan industri dan menerima perlakuan eksklusif seperti penginapan dan kantin khusus, serta skala gaji yang menurut beberapa sumber mungkin tiga kali lebih tinggi daripada pekerja Indonesia.¹⁹ Pekerja Tionghoa juga dilarang berkeliaran di luar kawasan industri, dan hal ini dapat berkontribusi pada hubungan konfliktual yang berkembang antara dua kelompok pekerja di sana.²⁰ Pemisahan ini, yang diperparah oleh kendala bahasa dan waktu kerja yang panjang (yang berubah pada tahun 2019 dari delapan menjadi dua belas jam), meningkatkan sentimen anti-Tionghoa yang telah mengakar di sebagian masyarakat Indonesia sejak zaman kolonial, ketika pekerja Tionghoa menikmati perlakuan istimewa atas orang Indonesia dari negara penjajah Belanda.²¹

Awalnya karyawan Indonesia di IMIP mengeluhkan kurangnya waktu istirahat (terutama untuk waktu ibadah), kurangnya hari libur, dan sulitnya beradaptasi bekerja dengan rekan kerja Tionghoa. Mereka juga mengeluhkan masalah sanitasi, serta kesulitan mengoperasikan mesin dan harus berkomunikasi dengan bahasa tubuh karena kendala bahasa antara manajer dan staf.²² Pekerja Tionghoa dianggap merendahkan pekerja Indonesia dengan meneriaki mereka, atau merekam mereka bermain gim ketika waktu istirahat kemudian menuduh seolah-olah mereka “tidak bekerja”. Dan pekerja Indonesia balik menanggapi hal-hal tersebut yang menyebabkan beragam pertengkaran dan konflik.²³

Namun, pihak manajemen kawasan industri sering turun tangan menengahi perselisihan tersebut dan memperkenalkan beberapa langkah untuk membantu mengurangi gesekan yang ada. Istirahat waktu ibadah secara resmi ditetapkan, dan tiga masjid dibangun di dalam kawasan industri di area kantin, area dermaga, dan pusat IMIP. Kawasan industri tersebut mempekerjakan juru bicara dan juru bahasa—mayoritas penduduk setempat keturunan Tionghoa dari Batam, Sumatra, dan kota Surabaya di Jawa Timur. IMIP juga memberikan pelatihan bahasa Mandarin bagi karyawan pabrik. Konsesi dan kompromi ini diberikan kepada karyawan lokal guna memperbaiki kondisi kerja mereka.

Masalah ketenagakerjaan di sekitar kawasan industri juga berhubungan dengan dinamika seputar pekerja ilegal Tionghoa, kebutuhan untuk meningkatkan standar keselamatan di dalam kawasan industri, keberadaan calo pekerjaan gelap yang membebani secara finansial orang-orang yang ingin bekerja di kawasan industri, dan dinamika lain yang berkaitan dengan cepat dan tingginya pertumbuhan jumlah penduduk di daerah tersebut. Isu pekerja ilegal Tionghoa di kawasan industri ini sangat sensitif, sehingga langsung menarik perhatian media nasional dan ditangani di tingkat tertinggi pemerintahan. Presiden Widodo, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia terjun

untuk menengahi, dengan alasan bahwa mempekerjakan tenaga kerja asing adalah langkah sementara yang diperlukan demi memastikan transfer teknologi.²⁴ Seperti yang dijelaskan oleh pimpinan asosiasi bisnis Tiongkok saat wawancara dengan penulis, rumor tentang dua ratus ribu pekerja Tiongkok ilegal yang berduyun-duyun ke Indonesia tidak dapat dipercaya, karena pembengkakan biaya tenaga kerja Tionghoa—sekitar empat hingga lima kali lipat dari biaya mempekerjakan tenaga kerja Indonesia secara lokal—membuat hal itu tidak terjangkau dan tidak masuk akal bagi perusahaan untuk memboyong karyawan mereka sendiri dari Tiongkok. Selain itu, undang-undang ketenagakerjaan yang ketat di Indonesia membatasi jumlah total tenaga kerja asing sebanyak 20.000 pekerjaan per tahun, sehingga sangat sulit untuk membenarkan pengiriman pekerja berketerampilan rendah dari Tiongkok.

Polisi telah menangkap beberapa tenaga kerja Tionghoa ilegal di wilayah sekitar IMIP. Tetapi seseorang yang diwawancarai penulis mengatakan bahwa masalah ini adalah hasil dari proses aplikasi visa yang lama tertunda untuk pekerja asing, serta tingginya biaya aplikasi, yang mendorong perusahaan Tiongkok dan pekerja Tionghoa untuk menggunakan prosedur visa kunjungan saat kedatangan untuk memasuki negara.²⁵ Isu-isu ini kemudian menjadi bagian dari negosiasi tingkat atas dan pada akhirnya berakibat pada upaya Indonesia untuk melonggarkan prosedur persyaratan visa tertentu di bawah Undang-Undang Omnibus. Namun, hal ini ternyata menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat luas di Indonesia.

Kekhawatiran lokal lainnya seputar kawasan industri tersebut meliputi standar keamanan, terutama pada tahap awal, ketika terjadi kecelakaan fatal helikopter yang terekam kamera menjadi viral bagi publik Indonesia di YouTube. Kecelakaan kerja dan lemahnya keselamatan kerja sudah lazim dijumpai di Indonesia, tetapi para pekerja mengeluhkan bahwa standar dan peralatan yang disediakan di dalam kawasan industri baru ini tidak mencukupi, bahkan menurut standar Indonesia. Beberapa pekerja mengakui bahwa hanya satu set lengkap perlengkapan keselamatan dibagikan setahun sekali kepada semua karyawan, tetapi ini seringkali tidak mencukupi, dan mayoritas pekerja harus membeli sendiri. Pimpinan serikat pekerja mengatakan kepada penulis dalam sebuah wawancara bahwa jumlah cedera fatal dan non-fatal yang tercatat di tempat kerja telah meningkat tiga kali lipat sejak pendirian kawasan industri, dan bahwa kunjungan untuk memeriksa kondisi kerja mengungkapkan waktu kerja yang “biadab” dan lingkungan kerja yang tidak optimal.²⁶ Aspek ini pula yang memberi ruang bagi manajemen kawasan industri untuk mengambil tindakan perbaikan, seperti memberi waktu istirahat lebih lama meskipun memperpanjang waktu kerja menjadi dua belas jam, bukan delapan jam, dan mulai memberikan dua hari libur penuh tiap minggu. Pelatihan selama tiga bulan untuk setiap karyawan juga mulai diberlakukan, dengan masa induksi satu minggu setelah pekerja secara resmi memulai pekerjaan mereka.

Terlepas dari beberapa isu kehumasan yang dihadapi IMIP relatif mudah dipecahkan oleh manajemen kawasan industri, pembangunan wilayah di sekitar kawasan industri memberi dampak sosial dan lingkungan lain yang membutuhkan ditingkatkannya tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Tak lama kemudian, artikel-artikel berita mulai mendokumentasikan praktik-praktik ilegal—misalnya, praktik-praktik makelar ketenagakerjaan yang membebankan biaya terlalu tinggi kepada pencari kerja sebagai imbalan agar dapat dipekerjakan oleh kawasan industri.²⁷ Praktik-praktik ini juga disebutkan dalam wawancara penulis dengan pekerja pabrik di lokasi. Dan karena kawasan industri ini memprioritaskan perekrutan penduduk asli Morowali, praktik-praktik gelap yang berhubungan dengan penerbitan KTP baru, seperti jual beli suara, mulai menjamur.²⁸

Konstruksi besar-besaran di luar kawasan industri yang bertujuan untuk mengakomodir pemukiman yang semakin tidak terkendali juga menyebabkan perubahan besar di area sekitarnya. Beberapa karyawan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan ketua asosiasi buruh di Indonesia mengeluhkan kepada penulis kondisi lingkungan yang semakin menurun di kawasan sekitar kawasan industri. Termasuk di dalamnya adalah debu yang parah, peningkatan banjir dan tanah longsor, dan penurunan kualitas air karena pembuangan limbah langsung di daerah tersebut dan aktivitas pelabuhan. Hal-hal ini pada akhirnya berdampak negatif pada kesehatan dan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri karena tangkapan ikan menurun dan begitu pula jumlah lahan pertanian karena adanya kontaminasi dan pengambilalihan lahan untuk kegiatan pertambangan dan pembangunan infrastruktur.²⁹

Meskipun demikian, sebuah survei yang dilakukan oleh para ilmuwan Indonesia di daerah tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar penduduk menganggap ketersediaan layanan kesehatan di desa-desa sekitar kawasan industri sangat memuaskan.³⁰ Hal ini juga berkat dana CSR yang telah dikururkan perusahaan sejak awal berdirinya pada tahun 2012, sejumlah kurang lebih 7,5 miliar rupiah per tahun. Kawasan industri ini juga menjalankan program pengembangan masyarakat yang memiliki dua tujuan utama: elektrifikasi desa-desa sekitar, yang sekarang memiliki listrik bersubsidi dua puluh empat jam dan pembangunan desa, dan distribusi 450–500 juta rupiah ke dua belas desa untuk mendukung pengembangan usaha-usaha lokal serta untuk membangun dan memelihara sekolah, rumah sakit, masjid, dan ruang komunal lainnya serta fasilitas asrama bagi pekerja.³¹ Pada tahun 2017, dana CSR dihimpun menjadi 30 miliar rupiah untuk membangun jaringan listrik berskala besar yang menghubungkan Bahodopi ke pesisir Morowali dan Bungku Tengah, ibu kota Kabupaten Morowali, menyalurkan sebagian listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga batu bara di kawasan industri tersebut. Selain itu, pada tahun 2023, dua tim CSR IMIP—tim pengembangan masyarakat dan tim lingkungan—meluncurkan rencana lima tahun untuk merehabilitasi terumbu karang di desa Mbokita di Kepulauan Menui bekerja sama dengan Sombori Dive Conservation, sebuah konsultan di bidang lingkungan.³²

Namun terlepas dari upaya-upaya tersebut, aktivitas perusahaan telah dikaitkan dengan perilaku pemburu rente pejabat pemerintah daerah. Menurut salah satu orang Indonesia yang diwawancarai, “Kebijakan pemerintah kamilah yang mengedepankan fleksibilitas untuk investasi Tiongkok; banyak peraturan bisa diabaikan,” sehingga investor Tiongkok “lebih suka mengucurkan uang mereka dengan menyuap pemerintah daerah daripada menggunakannya untuk mengupayakan praktik pertambangan yang baik serta standar kesehatan dan keselamatan”.³³ Dalam situasi seperti ini, pengawasan dari organisasi masyarakat sipil yang mengupayakan kerja sama yang baik dengan otoritas setempat menjadi sangat krusial; mereka dapat mendokumentasikan kondisi buruk ini sambil menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola lokal, menjembatani otoritas lokal dan masyarakat yang terdampak. Laporan-laporan oleh organisasi-organisasi ini yang banyak jumlahnya telah membantu meningkatkan kesadaran pemerintah daerah, sebagai contoh dipicunya penyelidikan ombudsman guna menyelidiki klaim penduduk desa. Namun, terdapat juga kasus di mana penduduk desa membuat tuntutan yang tidak layak karena ketidaktahuan mereka tentang peraturan perusahaan, seperti tuntutan agar dana CSR dicairkan kepada mereka dalam bentuk uang tunai. Dalam ranah ini, melalui mitranya di Indonesia, IMIP telah mempekerjakan karyawan yang kompeten guna mengatasi masalah tersebut melalui keterlibatan dan edukasi serta dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan LSM lokal.

Efek Makro: IMIP, Nasionalisme Sumber Daya, dan Transisi Energi Terbarukan Indonesia

Salah satu alasan mengapa dampak lingkungan dan sosial dari investasi Tiongkok begitu menonjol di Indonesia juga berkaitan dengan dinamika makro IMIP dan kawasan industri lainnya. Keputusan Indonesia untuk memberlakukan larangan ekspor pada tahun 2014 menjadikan, hanya dalam beberapa tahun, IMIP dan kawasan industri besar lainnya yang diinvestasikan oleh Tiongkok sebagai pembeli terbesar produk nikel Indonesia. Karena perusahaan pertambangan dalam negeri tidak bisa lagi menjual kepada pembeli luar negeri, kawasan industri besar ini menciptakan oligopsoni—situasi pasar di mana masing-masing dari beberapa pembeli memberikan pengaruh yang tidak proporsional di pasar karena distorsi yang ditimbulkan oleh larangan ekspor.³⁴ Hal ini memungkinkan pemain Tiongkok untuk memonopoli permintaan nikel Indonesia, dan berarti mereka dapat menekan penambang domestik negara tersebut untuk menjual dengan harga di bawah rata-rata pasar. Hal ini kemudian menyebabkan perusahaan Indonesia mengambil jalan pintas pada praktik lingkungan dan keselamatan untuk menutupi kerugian keuntungan mereka.³⁵ Beberapa dari perusahaan ini mengeluhkan larangan tersebut, yang sebagian dilonggarkan pada tahun 2017, tetapi peraturan itu sendiri tetap berlaku dan diberlakukan kembali pada tahun 2019 demi memajukan strategi pembangunan Indonesia yang bertujuan meningkatkan produksi nilai tambah.³⁶ Hasilnya adalah produksi baja nirkarat Tsingshan

Tabel 2. Kapasitas Baja Nirkarat Tsingshan Group (dalam jutaan ton)

	Lokasi	Smelting	Slab	Billet	HR AP flats	HR longs	CR
Guangqing Metal Tech	Guangdong	2	1,7	0,5	2*	-	-
Zhejiang Ruipu Tech	Zhejiang	-	-	-	-	0,3	-
Zhejiang Tsingshn Iron & Steel	Zhejiang	0,4	-	0,4	-	-	-
Fujian Dingxin Industry	Fujian	0,85	0,85	-	1	-	-
Fujian Dingxin Nickel Industry	Fujian	3	3	0,8	-	0,8	-
Fujian Dingxin Tech	Fujian	-	-	-	3	-	0,3
Tsingtuo Special Steel	Fujian	2*	2	-	-	-	-
Tsingtuo Shangke Stainless	Fujian	-	-	-	-	-	0,3*
Indonesia Guangqing Nickel & Stainless	Indonesia	2	2	-	3	-	0,7*
Total		10,25	9,55	1,7	9	1,1	1,3

*Kapasitas yang dicanangkan ke depannya

SUMBER: Panos Kotseras, "The World's Largest Stainless Steel Producer Just Got Bigger," Cru Group, 6 September 2017, <https://www.crugroup.com/knowledge-and-insights/insights/the-world-s-largest-stainless-steel-producer-just-got-bigger/>.

menjadi sangat kompetitif karena memiliki akses ke nikel, batu bara, dan tenaga kerja yang sangat murah, dan karena telah mencapai produksi dan pemrosesan NPI yang sangat terintegrasi.

Daya saing Tsingshan dan larangan ekspor dari pemerintah pusat telah menarik tanggapan negatif secara regional dan global.³⁷ Seperti yang dijelaskan oleh analis utama Wood Mackenzie, efek pertama adalah pada pasar Tiongkok itu sendiri. Pabrik Tsingshan di Morowali mulai berproduksi pada pertengahan 2017 dan pada saat itu hasilnya sebagian besar dikirim ke Tiongkok, sebagaimana disebutkan juga oleh narasumber lain kepada penulis.

Akan tetapi, karena pabrik tumbuh secara eksponensial (lihat tabel 2), pasar Tiongkok tidak mampu menyerap produksi yang sangat besar. Salah satu pesaing utama Tsingshan, Tisco, mulai melobi pemerintah untuk mengambil tindakan. Terancam dengan potensi pengenaan bea antidumping, Tsingshan kemudian memangkas produksinya di Tiongkok dan memperluas basis pelanggannya di Asia Tenggara dan sekitarnya.³⁸ Namun hal ini tidak menghalangi pemerintah Tiongkok untuk memberlakukan tarif antidumping terhadap Indonesia, Korea Selatan, dan Eropa. Demikian pula, pada 22 November 2019, Uni Eropa menginisiasi sengketa oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap Indonesia, diikuti oleh Amerika Serikat kurang dari sebulan kemudian. Hal-hal

yang menjadi sorotan dalam tuntutan tersebut meliputi: (1) pembatasan dan pelarangan ekspor nikel Indonesia; (2) kebutuhan pengolahan dalam negeri untuk nikel, bijih besi, kromium, dan batu bara; (3) kewajiban pemasaran produk nikel dan batu bara di dalam negeri; (4) persyaratan perizinan ekspor nikel; dan (5) skema subsidi yang dilarang.³⁹

Indonesia juga menghadapi beberapa sengketa terkait kasus investasi oleh perusahaan tambang asing. Pada awal Juli 2014, hanya beberapa bulan setelah penerapan larangan ekspor dan keputusan Indonesia untuk tidak memperbarui perjanjian investasi bilateral (BIT) dengan Belanda, perusahaan Newmont Mining Corporation asal Belanda mengajukan kasus terhadap Indonesia menggunakan BIT Indonesia-Belanda kepada Pusat Internasional untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi (ICSID). Perusahaan ini mengklaim bahwa laangan ekspor Indonesia telah melanggar klausul yang ditetapkan oleh BIT, yang memberikan perlindungan luas kepada investor Belanda di Indonesia melalui mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara.⁴⁰ Sebulan kemudian, setelah mendapat pengecualian khusus dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan aktivitas pertambangannya, Newmont mencabut gugatannya. Dua perusahaan lainnya, Churchill Mining dan Planet Mining, juga menggugat pemerintah Indonesia atas pencabutan izin pertambangan mereka di Kalimantan berdasarkan BIT Indonesia dengan Inggris dan Australia, namun dalam kasus mereka izin tersebut dibatalkan karena adanya dugaan dokumen palsu terkait izin operasional mereka.⁴¹

Walaupun langkah-langkah seperti larangan ekspor akan menjadikan ekonomi Indonesia kurang diminati sebagai tujuan investasi, dan meskipun pemerintah kemungkinan akan kalah dalam sengketa internasionalnya melawan Uni Eropa di WTO, Presiden Widodo tampaknya akan memperluas langkah-langkah tersebut ke industri mineral penting lainnya. Dalam suatu wawancara, dia menyatakan akan “baik-baik saja” jika Indonesia kalah dalam perselisihan tersebut, karena industrinya sudah dibangun dan pendapatan ekspor negara dari nikel telah meningkat nilainya dari sekitar \$1 miliar tujuh tahun lalu menjadi \$20,9 miliar pada tahun 2021.⁴² Mineral lain yang akan mendapat pelarangan ekspor dalam keputusan kebijakan mendatang oleh pemerintah pusat dapat mencakup bauksit, timah, emas,⁴³ dan bahkan produk nikel olahan seperti NPI dan feronikel, karena Indonesia sekarang mencoba mengarahkan semua nikelnya ke industri manufaktur baterai EV.

Sementara itu, terlepas dari langkah-langkah tersebut yang memicu penolakan internasional, beberapa negara termasuk Taiwan memilih taktik yang berbeda—malah menyambut baik produksi baru oleh dan di Indonesia dan menghentikan produksi dalam negeri mereka sendiri. Investasi tersebut telah memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Menurut mantan eksekutif senior Tsingshan, IMIP “berkontribusi pada pembangunan lokal dan nasional.” Ia mengklaim bahwa “pendapatan pemerintah daerah meningkat 100 kali lipat” sebagai hasil dari kawasan industri tersebut. Ia juga menyebutkan peningkatan tenaga kerja terampil dan terwariskannya keterampilan kerja lintas generasi keluarga sebagai efek positif yang berkontribusi pada pembentukan kelas pekerja

lokal.⁴⁴ IMIP menerima berbagai insentif dari pemerintah Indonesia dan dari statusnya sejak diidentifikasi sebagai “proyek strategis nasional”.⁴⁵ Insentif ini termasuk fasilitasi perizinan dan pengurangan pajak, walau kawasan industri tersebut masih berhasil meningkatkan pendapatan pajak pemerintah pusat dengan membayar bea ekspor.

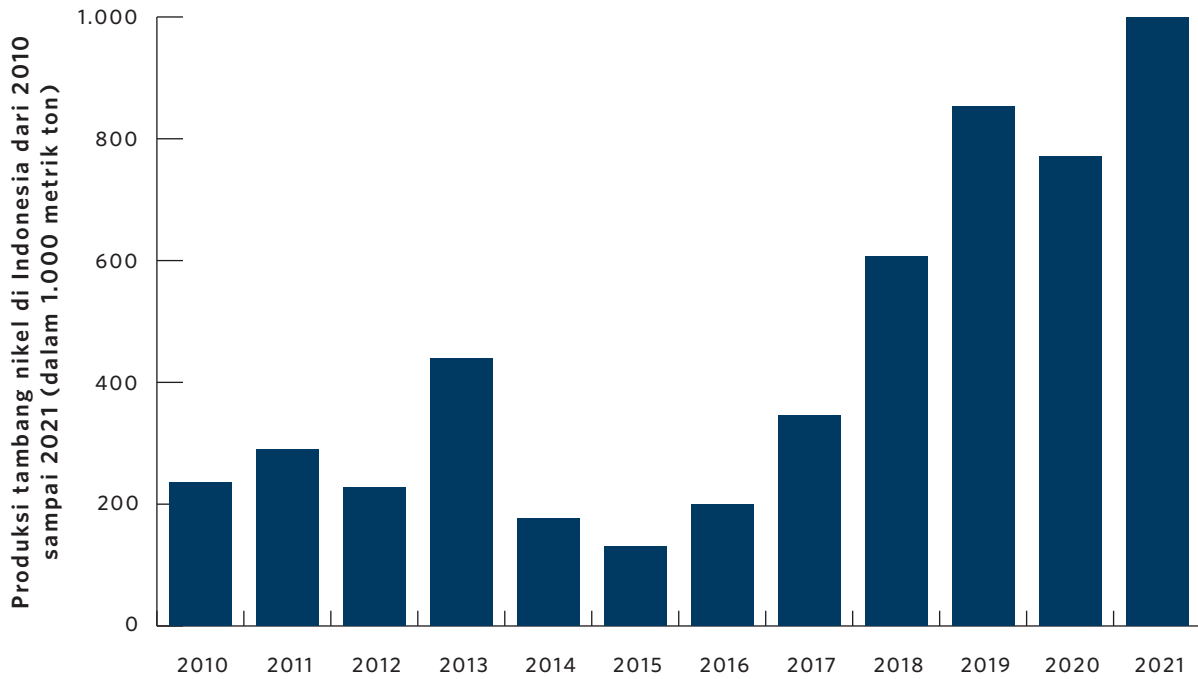
Meskipun kawasan-kawasan industri dengan pabrik smelter telah meningkatkan produksi nikel Indonesia menjadi yang terbesar di dunia saat ini, cadangan nikel negara ini yang juga termasuk yang terbesar di dunia dengan cepat menipis karena peningkatan produksinya yang meroket (lihat gambar 2 dan 3).

Menyadari cadangan nikelnya yang terus berkurang, pemerintah Indonesia mencoba untuk meningkatkan nilai produksi industri nikel—dan untuk melakukannya, pemerintah telah mencari investasi teknologi untuk mengekstraksi mineral ini dari tanah secara lebih efisien. Salah satu contohnya adalah teknologi HPAL, yang memungkinkan penambang Indonesia untuk memproses ekstraksi bijih tersebut untuk menghasilkan nikel Kelas I untuk bahan baku baterai. Namun salah satu yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi semacam ini adalah pengelolaan pembuangan limbah produksi beracun. Pembuangan limbah tailing ke laut dalam (DSTD) adalah salah satu cara pembuangan limbah yang paling umum, tetapi sebagaimana alternatif lainnya—membangun bendungan tailing atau pembuangan di darat—hal ini memiliki banyak dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Di sinilah pelaku industri dari Tiongkok turun tangan. Sebuah rencana untuk menggunakan teknologi DSTD telah diajukan pada Januari 2020 oleh perusahaan utama di IMIP, PT Hua Pioneer, tetapi dibatalkan pada Oktober 2020 karena penantian panjang dan tekanan sosial yang meningkat akibat kekhawatiran bagi lingkungan dan masyarakat nelayan setempat.⁴⁶ Akhirnya, perusahaan Tiongkok ini menanggapi tekanan sosial dengan mengalihkan fokusnya ke pembuangan berbasis lahan di darat. Sebagian besar pabrik, termasuk yang ada di Morowali, tampaknya telah memilih pembuangan berbasis lahan, tetapi satu pabrik di negara tetangga Papua Nugini menggunakan DSTD.⁴⁷ Saat ini, terdapat satu di Indonesia dan tiga di Papua Nugini dari enam belas tambang di dunia yang menerapkan DSTD, tetapi kedua negara tersebut menyumbang 91 persen dari perkiraan 227 juta ton limbah tailing yang sejauh ini telah dibuang ke laut. Hal ini semakin memprihatinkan mengingat Indonesia dan Papua Nugini terletak di tengah-tengah kawasan Segitiga Terumbu Karang.⁴⁸

Karena dampak lingkungan yang merusak ini, pemerintah Indonesia kurang berhasil dalam menarik lebih banyak investor asing ke proses manufaktur mobil listrik Indonesia, bahkan di tengah banyaknya insentif, termasuk pengurangan tarif impor dan pajak barang mewah yang lebih rendah untuk konsumen.⁴⁹ Salah satu contohnya adalah Tesla yang setelah bertahun-tahun dirayu untuk berinvestasi di tanah air akhirnya bertemu dengan pejabat pemerintah Indonesia pada akhir tahun

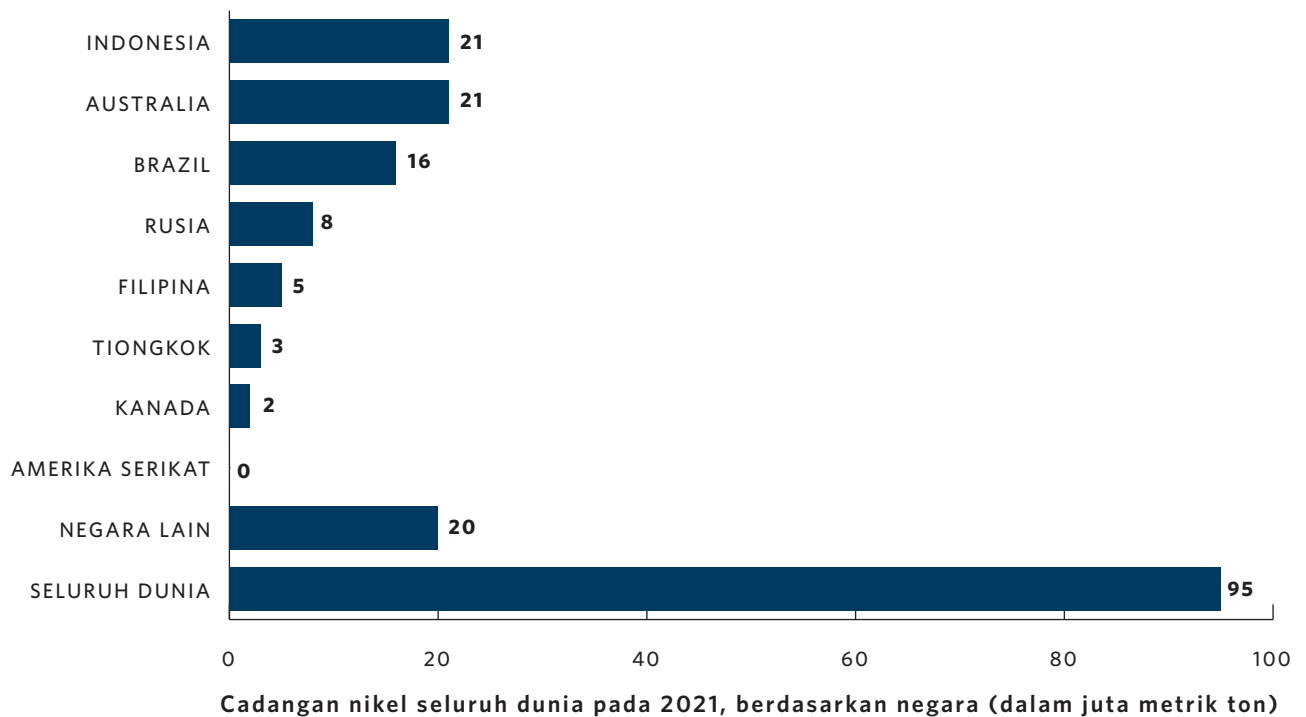
Gambar 2. Produksi Tambang Nikel Indonesia 2010-2021



*Catatan: Nilai tahun 2021 adalah nilai estimasi

SUMBER: "Mineral Commodity Summaries 2022," U.S. Geological Survey, 31 Januari 2022, <https://doi.org/10.3133/mcs2022>.

Gambar 3. Cadangan nikel seluruh dunia berdasarkan negara 2021



SUMBER: "Mineral Commodity Summaries 2022," U.S. Geological Survey, 31 Januari 2022, <https://doi.org/10.3133/mcs2022>.

2020 tetap tidak berhasil. Hal ini kemungkinan besar karena tidak sejalannya branding Tesla sebagai perusahaan yang “bersih” dengan situasi pertambangan di Indonesia yang dinilai dapat menimbulkan risiko terhadap citra perusahaan.⁵⁰ Walaupun akhirnya Tesla memutuskan untuk berinvestasi di Kaledonia Baru, produsen EV papan atas dunia lainnya seperti Tiongkok, termasuk BYD dan BAIC, berpotensi mendapat manfaat dari investasi semacam itu. Saat ini, tampaknya lima dari enam fasilitas HPAL yang dibangun di Indonesia telah beroperasi, dan sebagai hasilnya, produksi material seperti nikel matte dan endapan hidroksida campuran (MHP) yang dapat diubah menjadi nikel sulfat untuk pembuatan baterai tengah meroket.⁵¹

Seluruh fasilitas HPAL di Indonesia saat ini berbahan bakar batu bara, sedangkan pabrik di luar negeri, sebaliknya, mulai mengintegrasikan teknologi untuk membuat prosesnya lebih berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah proyek Sunrise Australia, yang dikembangkan oleh Clean TeQ, sebuah perusahaan Australia yang berupaya menggunakan tenaga surya sebagai pengganti batu bara, memulihkan uap dan panas, dan menghasilkan 60 persen pelindian asam bertekanan dari pabrik asam internalnya.⁵²

Sebagai akibat dari biaya lingkungan dan sosial yang begitu tinggi, kritik dan mobilisasi publik meningkat. Pada bulan April 2021, sebuah LSM Indonesia bernama Action for Ecology and People’s Emancipation memulai petisi di Change.org untuk menekan industri HPAL agar mengikuti standar terbaik dunia, mendesak pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya untuk berhenti mengeluarkan izin pembuangan limbah tailing untuk DSTD, mensyaratkan perusahaan untuk menggunakan sumber energi terbarukan, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Morowali dan Pulau Obi, di mana pertambangan dan pengolahan nikel terkonsentrasi di sana. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menghentikan pemberian izin DSTD pada Februari 2021, namun beberapa pembangkit, seperti yang ada di Pulau Obi, masih menunggu keputusan akhir atas permintaan mereka.⁵³ Namun pada tahun 2022, baik Halita Group di Pulau Obi maupun PT Hua Pioneer di Morowali mundur dari rencana DSTD mereka, setelah ditentang keras oleh masyarakat lokal dan LSM.⁵⁴ Yang pertama mundur adalah PT Hua Pioneer, yang mendapat banyak pujian atas keputusannya oleh LSM Indonesia. Di sisi lain, protes penduduk desa setempat dan kelompok lingkungan terhadap Halita Group milik seorang pengusaha Tionghoa Indonesia dan paparan media tentang dampak lingkungan yang mengerikan dari aktivitas perusahaan di Kepulauan Maluku akhirnya mendorong perusahaan untuk mengurungkan rencananya dan menggantinya dengan proposal yang juga tidak meyakinkan untuk membuka hutan untuk membuang limbah tailing.

Adapun karena proses ini sepenuhnya didorong oleh investasi Tiongkok, industri global diperkirakan akan mengalami guncangan besar. Impor nikel Tiongkok dari Indonesia bergeser cepat yang mencerminkan perubahan kebijakan dan ambisi baru. Akibatnya, impor nikel matte naik dari nol pada 2021 menjadi 74.000 ton pada delapan bulan pertama 2022, sementara impor MHP naik dari

15.000 menjadi 251.000 ton pada periode yang sama pada 2021. Bahan ini berasal dari pabrik-pabrik HPAL baru di Indonesia, seperti yang dioperasikan oleh PT Huayue, yang mulai mengantarkan kiriman pertamanya ke pelabuhan Ningbo di Tiongkok pada Februari 2022. Pada saat yang sama, impor NPI dan feronikel mencapai 583.000 ton pada Agustus 2022. Akibatnya pergeseran ini, permintaan Tiongkok untuk nikel Kelas I — bentuk bahan baku yang diminati dalam pembuatan baterai EV dan yang diperdagangkan di pasar global seperti London Metal Exchange dan Shanghai Futures Exchange — telah turun sebesar 33 persen. Pasokan nikel secara global juga kemungkinan akan turun karena sebagian besar berasal dari Rusia, yang pasokannya telah dibatasi di tengah invasi Ukraina. Oleh karena itu, pasar global mengalami volatilitas yang tinggi karena berkurangnya pasokan nikel Kelas I dan fakta bahwa industri tersebut sekarang beralih ke produk nikel semi-manufaktur karena besarnya produksi Indonesia, yang tidak diperdagangkan oleh pasar logam dunia dan oleh karena itu sekarang menyebabkan distorsi pasar yang cukup besar dalam industri nikel.⁵⁵

Pelajaran dan Adaptasi Tiongkok

Dalam kasus Indonesia Morowali Industrial Park di Sulawesi Tengah, kepentingan pembangunan lokal telah mendorong investasi Tiongkok. BRI Tiongkok sering dianggap dorongan dari Beijing; namun dalam kasus ini, Indonesia dan keinginan mereka untuk menjadi pemain yang lebih besar di pasar nikel dunialah yang menjadi dorongan atas langkah-langkah yang telah diambil, dengan kepentingan pemerintah dan korporasi Indonesia yang melihat peluang untuk memenuhi tujuan pembangunan dan mengejar sasaran kebijakan industri.

Secara khusus, mantan presiden Yudhoyono yang ketika itu melihat bahwa ledakan komoditas dunia akan segera berakhir mulai mengembangkan strategi untuk beralih dari ekspor mineral mentah dan membawa investasi manufaktur untuk mengolah mineral tersebut menjadi produk bernilai tambah. Hal ini didasari oleh ledakan komoditas dunia yang meningkatkan PDB Indonesia, tetapi menurut banyak ahli di negara ini, manfaat ekonomi tersebut tidak menjangkau populasi yang lebih luas dan tidak tersalurkan untuk pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, meskipun pemerintah Indonesia mendorong kepentingan Tiongkok di dalam negeri sebagai sumber utama modal dan teknologi untuk mewujudkan ambisi restrukturisasi produksi mineral, keterlibatan dengan Tiongkok itu sendiri menimbulkan kontroversi politik dan sosial.

Di pihak Tiongkok, ada dua faktor utama yang mendorong perusahaan-perusahaannya berinvestasi di sektor mineral Indonesia. Yang pertama adalah larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2014 atas ekspor mineral mentah—sarana utama bagi strategi Indonesia untuk menekan

perusahaan asing agar berinvestasi; yang kedua adalah BRI Tiongkok, yang mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukannya, sebagian sebagai tanggapan atas kebutuhan pemerintah seperti yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2014, Presiden Widodo memberlakukan larangan ekspor yang kontroversial atas mineral yang belum diolah di mana semua perusahaan yang beroperasi di dalam negeri diberikan masa tenggang *hanya* jika mereka berinvestasi dalam aktivitas pengolahan. Bersama dengan Filipina, Indonesia merupakan sumber utama nikel mentah Tiongkok, sehingga banyak perusahaan Tiongkok di dalam negeri berupaya untuk mendatangkan investasi ke kegiatan hilir seperti peleburan dan mendirikan kawasan-kawasan industri besar demi mempertahankan akses mereka ke sumber daya nikel di Indonesia. Beberapa dari kawasan industri ini tentu saja difasilitasi oleh BRI Tiongkok karena mereka menjadi platform bagi kerja sama bilateral antara Tiongkok dan Indonesia.

IMIP adalah salah satu contoh proyek yang didirikan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani setelah pengumuman Presiden Xi tentang MSR dalam pidatonya di parlemen Indonesia. Proyek ini kemudian mendapat dukungan finansial dari China-ASEAN Investment Cooperation Fund (salah satu sarana finansial utama untuk mendukung BRI), Export-Import Bank of China, dan HSBC China. IMIP ditetapkan sebagai proyek strategis nasional oleh Indonesia dan banyak difasilitasi untuk perizinan selain insentif pajak yang besar. Kawasan industri ini sekarang menjadi salah satu pusat produksi nikel terbesar di Asia Tenggara, jika bukan yang terbesar. Kawasan industri ini mempekerjakan 43.000 tenaga kerja dan memberi kontribusi besar bagi perekonomian daerah Sulawesi. IMIP dan kawasan industri smelter investasi Tiongkok lainnya telah menjadikan Indonesia, bersama dengan negara-negara lainnya yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, menjadi negara terbesar yang menawarkan produksi nikel dan produk terkait nikel, seperti NPI, baja nirkarat, dan tidak lama lagi baterai EV.

Secara sederhana, berinvestasi di Indonesia merupakan satu-satunya cara bagi perusahaan Tiongkok untuk mempertahankan akses ke nikel setelah larangan ekspor diberlakukan. Bahkan, harga nikel menjadi lebih murah di Indonesia karena penambang lokal tidak bisa lagi mengekspor tetapi hanya menjual produknya di dalam negeri. Oleh karena itu, kawasan industri Tiongkok ini telah menjadi pembeli domestik terbesar sumber daya tersebut dan dapat menurunkan harga karena pengaruhnya. Akibatnya, kawasan industri seperti IMIP mendapat manfaat seperti memiliki akses ke nikel dan batu bara murah untuk menjalankan pembangkit listrik tenaga batu bara yang diperlukan untuk aktivitas peleburan. Mereka juga mendapat manfaat dari proses yang sangat terintegrasi di kawasan industri, yang memungkinkan mereka menghasilkan NPI. Sehingga, produk setengah jadi mereka menjadi jauh lebih murah daripada perusahaan pesaing.

Tapi hal ini menimbulkan efek beragam. Beberapa negara memberlakukan tarif antidumping terhadap produk Indonesia, sementara negara lain, seperti Taiwan, lebih memilih membeli dari Indonesia daripada melebur baja nirkarat mereka sendiri. Dan ini merupakan peluang penting bagi

perusahaan Tiongkok dan Indonesia untuk memposisikan diri secara strategis dalam restrukturisasi rantai nilai global yang terjadi karena transisi ke EV. Bagi perusahaan Tiongkok, hal ini memberi akses ke sumber daya dan tenaga kerja murah di Indonesia, dengan peraturan dan pengawasan lingkungan yang jauh lebih ketat daripada yang berlaku di dalam negeri di Tiongkok. Bagi Indonesia, hal ini memberi peluang untuk memposisikan negaranya sebagai kekuatan manufaktur baru yang akan diuntungkan dari pertumbuhan penjualan EV di Kawasan ke depannya.

Namun apa arti hal ini bagi keberlanjutan produksi dunia dan bagi masa depan hubungan internasional? Ada dua dinamika penting yang bermain.

Yang pertama adalah paradoks transisi energi terbarukan, di mana negara maju dan berkembang kini mulai secara bertahap beralih ke sistem produksi energi dan sistem transportasi yang mencakup penggunaan energi terbarukan. Namun, walaupun sistem seperti itu jauh lebih berkelanjutan dan bisa sangat mengurangi emisi bagi konsumen akhir, kerusakan lingkungan ditanggung sepenuhnya oleh wilayah yang melakukan penambangan, dan pada akhirnya oleh masyarakat yang tinggal di sana. Oleh karena itu, kasus Indonesia menunjukkan perangkap transisi energi terbarukan, di mana efek negatifnya hanya dialihkan ke negara-negara berkembang yang bersedia untuk mengupayakan dan menanggungnya, dengan dampak yang berujung pada ketidaksetaraan.

Dinamika kedua adalah bahwa negara-negara seperti Indonesia menantang institusi dan nilai-nilai tradisional Barat, seperti peran WTO dan ideologi perdagangan bebas, mendukung pendekatan negara-sentris dan nasionalistik yang sebagian menjadi lebih umum dijumpai di wilayah Asia-Pasifik. Banyak pihak yang memandang kawasan dinamis ini sebagai salah satu yang paling menjanjikan dari segi pertumbuhan ekonomi jangka panjang perlu menimbang fakta bahwa nilai-nilai liberal Barat semakin tergantikan oleh pendekatan globalisasi baru yang bersifat negara-sentris. Adaptasi Tiongkok terhadap dorongan pembangunan, kebijakan industri, dan persyaratan pelokalan Indonesia terlihat menjanjikan.

Tentang Penulis

Angela Tritto adalah asisten profesor di Institute of Asian Studies di Universitas Brunei Darussalam. Ia sebelumnya bekerja di Hong Kong University of Science and Technology. Pada tahun 2020 ia dianugerahi Hong Kong Postdoctoral Fellowship dan menjabat sebagai anggota Dewan Pariwisata Berkelanjutan Global Masa Depan di Forum Ekonomi Dunia. Penelitian terbarunya meneliti Prakarsa Sabuk dan Jalan Tiongkok di Asia Tenggara. Publikasinya menganalisis peran organisasi publik, swasta, dan sektor ketiga dalam mempengaruhi hasil dan keberlanjutan pembangunan. Ia meraih gelar PhD dalam Kebijakan Publik dari City University of Hong Kong.

Catatan

- 1 “Meeting Asia’s Infrastructure Needs,” Bank Pembangunan Asia, Februari 2017, <https://dx.doi.org/10.22617/FLS168388-2>.
- 2 Jeannie Henderson, *Reassessing ASEAN* (London: Routledge, 1999); Anthony Smith, “Indonesia’s Role in ASEAN: the End of Leadership?” *Contemporary Southeast Asia* 21, no. 2 (Agustus 1999): 238–260, <https://www.jstor.org/stable/25798455>.
- 3 Christopher B. Roberts and Erlina Widyarningsih, “Indonesian Leadership in ASEAN: Mediation, Agency and Extra-Regional Diplomacy,” dalam *Indonesia’s Ascent*, ed. Christopher B. Roberts, Ahmad D. Habir, dan Leonard C. Sebastian (London: Palgrave Macmillan, 1999); Felix Heiduk, “Indonesia in ASEAN: Regional Leadership Between Ambition and Ambiguity,” Stiftung Wissenschaft und Politik, April 2016, https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2016RP06_hdk.pdf.
- 4 Rizal Sukma, *Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship* (London: Routledge, 1999).
- 5 Dewi Fortuna Anwar, “Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,” *International Affairs* 96, no. 1 (Januari 2020), 111–129, <https://academic.oup.com/ia/article-abstract/96/1/111/5697504>.
- 6 “Jokowi Courts Investment During Japan and China Visits,” Economist Intelligence Unit, 27 Maret 2015, http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=863024670&Country=Indonesia&topic=Politics&subtopic_1.
- 7 Bernadetta Devi dan Dody Prayogo, “Mining and Development in Indonesia: An Overview of the Regulatory Framework and Policies,” International Mining for Development Centre, Maret 2013, <https://delvedatabase.org/uploads/resources/Mining-and-Development-in-Indonesia.pdf>.
- 8 Eve Warburton, “Nationalism, Developmentalism and Politics in Indonesia’s Mining Sector” dalam *Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty*, ed. Arianto A. Patunru, Mari Pangestu, dan M. Chatib Basri (Singapura: ISEAS Publishing, 2018), 90–108; Alvin A. Camba, Angela Tritto, dan Mary Silaban, “From the Postwar Era to Intensified Chinese Intervention: Variegated Extractive Regimes in the Philippines and Indonesia,” *The Extractive Industries and Society* 7, no. 3 (Agustus 2020): hlm.1054–1065.
- 9 “Mining Sector Remains Vulnerable to Policy Swings, Uncertainty,” Assef Hamzah dan Rekan, Agustus 2012, <https://www.ahp.id/client-alert-01-august-2012/>.
- 10 Assef Hamzah and Partners, “Mining Sector Remains Vulnerable.”
- 11 Polly Yam “UPDATE 1-China Steel Firm Axes Indonesian Nickel Project,” Reuters, 26 Maret 2009, <https://www.reuters.com/article/nickel-tsingshan-indonesia-id1NHKG981820090326>.
- 12 Andante Hadi Pandyaswargo et al., “The Emerging Electric Vehicle and Battery Industry in Indonesia: Actions around the Nickel Ore Export Ban and a SWOT Analysis,” *Batteries* 7, no. 4 (November 2021), 80.
- 13 Warburton, “Nationalism, Developmentalism and Politics.”
- 14 Majalah Caijing, “Tsingshan’s Indonesia Morowali Industrial Park: Build, and They Will Come,” HSBC China, 2019, <https://www.business.hsbc.com.cn/en-gb/belt-and-road/story-5>.
- 15 Pius Ginting dan Ellen Moore, “Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP),” People’s Map of Global Tiongkok, 22 November 2021, <https://thepoplesmap.net/project/indonesia-morowali-industrial-park-ilip/>.
- 16 Muhammad Rushdi et al., “Fast and Furious for Future,” Rosa Luxemburg Stiftung, Dialogue Program Climate Justice, diakses 3 April 2023, https://www.rosalux.de/fileadmin/images/publikationen/Studien/Fast_and_Furious_for_Future.pdf.
- 17 “Indonesia’s Morowali Industrial Site Employs 43,000 People, but Only 5,000 Workers Are From China,” Agence France Press Indonesia, 10 Februari 2020, <https://factcheck.afp.com/indonesias-morowali-industrial-site-employs-43000-people-only-5000-workers-are-china>.
- 18 Wawancara penulis dengan mantan eksekutif senior kawasan industri Morowali, sekarang bertindak sebagai konsultan, Jakarta, 2018.
- 19 Wawancara penulis dengan karyawan divisi produk jadi IMIP, Morowali, 2019.
- 20 Viriya Singgih, “Morowali: A Tale of Tiongkok’s Grip on Rich Region,” <https://www.viriyasinggih.com/morowali-a-tale-of-chinas-grip-on-rich-region/>.

- 21 Diego Fossati, “Embedded Diasporas: Ethnic Prejudice, Transnational Networks and Foreign Investment,” *Review of International Political Economy* 26, no. 1 (Desember 2018): 1–24, <https://doi.org/10.1080/09692290.2018.1543721>.
- 22 Wawancara penulis dengan dua pekerja Indonesia di IMIP, Morowali, 2019.
- 23 Muammar Fikrie, “Berebut Kerja Dengan Pekerja Tiongkok [Scrambling to Work With Chinese Workers],” *Kamputo*, 20 Maret 2018, <https://web.archive.org/web/20230502002530/https://kamputo.com/berebut-kerja-dengan-pekerja-tiongkok/>.
- 24 Yose Rizal Damuri et al., “Perceptions and Readiness of Indonesia Towards the Belt and Road Initiative: Understanding Local Perspectives, Capacity, and Governance,” *CSIS Indonesia*, 2019, https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/CSIS_BRI_Indonesia_r1.pdf?download=1.
- 25 Wawancara penulis dengan ketua asosiasi bisnis Tiongkok, Jakarta, 2019.
- 26 Wawancara penulis dengan ketua serikat pekerja, Jakarta, 2019.
- 27 Viriya Singgih, “Everyone Wants Slice of Emerging Morowali,” *viriyasinggih.com*, 15 Desember 2017, <https://www.viriyasinggih.com/everyone-wants-slice-of-emerging-morowali/>.
- 28 Singgih, “Emerging Morowali”.
- 29 Wawancara penulis dengan pimpinan organisasi lingkungan setempat, Palu, 2019.
- 30 Mustainah Mustainah dan Andi Mascunra Amir, “In Morowali Regency, Central Sulawesi Province, A Strategy for Increasing Community Income Through Corporate Social Responsibility (CSR),” *Journal of Public Administration and Government* 4, no. 1 (29 April 2022): 11–19.
- 31 Ilyas Lampe, “Dynamics of Corporate Social Responsibility Implementation in Communities Around Nickel Industrial Areas of PT IMIP in Bahodopi District, Morowali Regency,” *Asian Journal of Environment, History and Heritage* 3, no. 2 (15 November 2019).
- 32 Hasanah Paradita, “Rehabilitasi Terumbu Karang Pulau Sombori – Sombori Island Coral Reef Rehabilitation,” LinkedIn post, <https://www.linkedin.com/in/tommy-adi-prayogo-8383a9168/recent-activity/all/>.
- 33 Wawancara penulis dengan ketua asosiasi hak pekerja setempat, Jakarta, 2019.
- 34 Alvin Camba, “Indonesia Morowali Industrial Park: How Industrial Policy Reshapes Chinese Investment and Corporate Alliances,” *Panda Paw Dragon Claw* (blog), 17 Januari 2021, <https://pandapawdragonclaw.blog/2021/01/17/indonesia-morowali-industrial-park-how-industrial-policy-reshapes-chinese-investment-and-corporate-alliances/>.
- 35 Camba, “Indonesia Morowali Industrial Park.”
- 36 Warburton, “Nationalism, Developmentalism and Politics.”
- 37 Reuters, “Indonesia Plans to ‘Hit the Brakes’ on Raw Commodity Exports,” *Mining.com*, <https://www.mining.com/web/indonesia-plans-to-hit-the-brakes-on-raw-commodity-exports-president/>.
- 38 “Tsingshan Indonesia Shakes Up Stainless Steel Markets in South East Asia,” *Wood Mackenzie*, 15 Juli 2019, <https://www.woodmac.com/press-releases/tsingshan-indonesia-shakes-up-stainless-steel-markets-in-south-east-asia/>.
- 39 “Dispute Settlement 592: Indonesia — Measures Relating to Raw Materials,” *Organisasi Perdagangan Dunia*, November 2022, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm.
- 40 Hilde van der Pas dan Riza Damanik “The Case of Newmont Mining vs Indonesia,” *Transnational Institute*, 12 November 2014, <https://www.tni.org/en/briefing/netherlands-indonesia-bit-rolls-back-implementation-new-indonesian-mining-law>.
- 41 Stefanie Schacherer “Churchill Mining v. Indonesia,” *Investment Treaty News*, 18 Oktober 2018, <https://www.iisd.org/itn/en/2018/10/18/churchill-mining-v-indonesia/>.
- 42 “Indonesia President Says Likely to Lose WTO Nickel Dispute Against EU,” *Reuters*, 7 September 2022, <https://www.reuters.com/article/indonesia-eu-nickel-idUSL4N30E151>.
- 43 Jo-Ann Huang, “Turning Nickel Into EV Batteries: Indonesia Wants to Take Its Mining Industry to the Next Level,” *CNBC*, 13 April 2022, <https://www.cnbc.com/2022/04/14/indonesia-wants-to-stop-exporting-minerals-make-value-added-products.html>.
- 44 Wawancara penulis dengan mantan eksekutif senior kawasan industri, sekarang bertindak sebagai konsultan, Jakarta, 2018.
- 45 “Smelter Development Project,” *KPPIP*, diakses 3 April 2023, <https://kppip.go.id/en/national-strategic-projects/u-smelter-development-project/>.

- 46 “Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Central Sulawesi, Indonesia,” EJ Atlas, diakses 3 April 2023, <https://ejatlas.org/print/indonesia-morowali-industrial-park-ilip1>.
- 47 Fransiska Nangoy dan Fathin Ungku, “Exclusive: Facing Green Pressure, Indonesia Halts Deep-sea Mining Disposal,” Reuters, 5 Februari 2021, <https://www.reuters.com/article/uk-indonesia-mining-environment-exclusiv-idUKKBN2A50VH>.
- 48 Ian Morse, “Indonesian Miners Eyeing EV Nickel Boom Seek to Dump Waste Into the Sea,” Mongabay, 18 Mei 2020, <https://news.mongabay.com/2020/05/indonesian-miners-eyeing-ev-nickel-boom-seek-to-dump-waste-into-the-sea/>.
- 49 Isabelle Huber, “Indonesia’s Nickel Industrial Strategy,” *Energi Rewired* (proyek), Center for Strategic and International Studies, 8 Desember 2021, <https://www.csis.org/analysis/indonesias-nickel-industrial-strategy>.
- 50 Ian Morse, “Indonesia Has a Long Way to Go to Produce Nickel Sustainably,” China Dialogue, 28 Mei 2022, <https://chinadialogue.net/en/pollution/indonesia-has-a-long-way-to-go-to-produce-nickel-sustainably/>.
- 51 Budi Prayogo Sunariyanto dan Luky A. Yusgiantoro, “EV Indonesian Nickel Battery: Potentials, Issues, and What Must Be Improved,” Purnomo Yusgiantoro Center, 8 June 2021, <https://www.purnomoyusgiantorocenter.org/ev-indonesian-nickel-battery-potentials-issues-and-what-must-be-improved/>.
- 52 Henrique Ribeiro, Jacqueline Holman, dan Lucy Tang, “Rising EV-grade Nickel Demand Fuels Interest in Risky HPAL Process,” S&P Global, 3 Maret 2021, <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/blogs/metals/030321-nickel-hpal-technology-ev-batteries-emissions-environment-mining>.
- 53 Nangoy dan Ungku, “Facing Green Pressure.”
- 54 Rabul Sawal, “Red Seas and No fish: Nickel Mining Takes Its Toll on Indonesia’s Spice Islands,” Mongabay, 16 Februari 2022, <https://news.mongabay.com/2022/02/red-seas-and-no-fish-nickel-mining-takes-its-toll-on-indonesias-spice-islands/>; “Hua Pioneer’s Steps to Cancel Request for Permit to Dispose of Tailings in the Morowali Sea Should Be the Standard for All Companies,” siaran pers, Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat, Jatim Sulawesi Tengah, Yayasan Tanah Merdeka, <https://aeer.info/en/hua-pioneers-steps-to-cancel-request-for-permit-to-dispose-of-tailings-in-the-morowali-sea-should-be-the-standard-untuk-semua-perusahaan/>.
- 55 Andy Home, “Column: Indonesia’s Nickel Surge Bad News for Price and Pricing,” Reuters, 30 September 2022, <https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesias-nickel-surge-bad-news-price-pricing-2022-09-29/>.



1779 Massachusetts Avenue NW | Washington, DC 20036 | P: +1 202 483 7600

CarnegieEndowment.org